**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM DI DESA ANGKASA
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN**

Oleh: Sukma Apyanda

Pembimbing: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Ulfa Hasanah, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Kubang Raya. Perum. Astam House, F-10.

Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

Email: yandalingkarputih@yahoo.com

ABSTRACT

Economic Enterprises-Village Savings and Loans hereinafter called UED-SP, the Village Empowerment Program (PPD), which made the Central Government to improve the economies of rural communities. Legal Basis On UED-SP is set on Government Affairs Regulation No. 6 of 1998 on Rural Economic Enterprises - Savings and Loans. Minister Regulation No. 6 of 1998 on Rural Economic Enterprises - Savings and Loans provide an understanding UED-SP is an institution engaged in the field of savings and loans and is owned by the village community / village cultivated and managed by village communities / villages.

The aim of this thesis to determine the cause of the debtor in default on UED-SP Taskin Space as well as to determine the completion of the problems for debtors who are in default on UED-SP Taskin Angkasa. Jenis research that will be used is the sociological research, sociological research is research that examines aspects legal to look at legislation in force and compares with the implementation on the ground by means of a survey. The location study was conducted in UED-SP Taskin held at Desa Angkasa District of Bandar Petalangan Pelalawan. Characteristically research descriptive. The data source is the legal data on the use of primary, secondary and tertiary.

It can be concluded, Factor causes of bad loans in UED-SP Taskin Space writer get consists of the following: factors derived from the UED-SP (Management and Authority), First, business less careful in analyzing the debtor's credit request. Second, the excessive extension of credit (over financing) on the needs of the debtor. Third, lack of supervision on loans. The next factor is derived from the internal debtors: First, Customer misuse of credit. Second, the customer is less able to manage their business. Third, the customer bad faith. And external factors beyond the ability UED-SP and the debtor: First, natural disasters. Second, Termination (PHK). Third, The decline in selling prices of agricultural products. While the completion of the problems for debtors who are in default on UED-SP Taskin Space never seizure and sale of collateral debtors. It is based on the decision of the village consultation meetings. Following the completion of the problems of the borrowers who are in default: First, the decrease in Interest Rate. Second, the extension of credit period. Third, Sales part or all of the guarantee by the debtor. Fourth, the Sale of Goods Warranty conducted by UED-SP Taskin Space. UED-SP Taskin Space does not conduct auctions for debtors that do arrears which has been given a subpoena by 2 times, this policy is decided by consensus Village for certain considerations.

Keywords: Implementation Agreements, credit freeze and UED-SP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia Dalam mewujudkan pembangunan perekonomian yang sesuai dengan tujuan pembangunan perekonomian yang tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa.¹ Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam selanjutnya disebut UED-SP, merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dibuat Pemerintah Pusat guna meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Dasar Hukum Tentang UED-SP ini diatur pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam memberikan pengertian UED-SP adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/kelurahan.² UED-SP merupakan lembaga keuangan Mikro yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat Desa kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan modal guna menumbuh kembangkan usahanya dalam bentuk simpan pinjam. Berikut beberapa tujuan yang diharapkan dengan adanya UED-SP :

- a) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah;
- c) Mendorong usaha sektor Informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan;
- d) Menghindarkan anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas

uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;

- e) Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan bantuan modal;
- f) Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.³

Dan adapun kegiatan usaha UED-SP meliputi :

- a) Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif;
- b) Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota UED-SP;
- c) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.⁴

Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) tentunya memerlukan modal dalam menjalankan usahanya. Sebagai modal awal bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sejak tahun 2005 berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 tanggal 5 April 2005 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Dana Usaha Desa (DUD) Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan- Simpan Pinjam (UED/K-SP) dalam bentuk sharing budget sebesar Rp. 500.000.000,00. per Desa/kelurahan.Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Inilah yang menjadi modal awal pendirian UED-SP yang ada di Provinsi Riau, serta tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga.⁵

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI*, Jakarta, 2005, hlm. 125.

²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 tanggal 5 April 2005 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Dana Usaha Desa (DUD) Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan- Simpan Pinjam (UED/K-SP).

Dalam kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan hutang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan serta berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.⁶ Hal tersebut juga terjadi jika masyarakat melakukan peminjaman pada UED-SP yang berada di Desa Angkasa selanjutnya disebut UED-SP Taskin Angkasa. Agunan menjadi salah satu persyaratan bagi masyarakat yang membutuhkan modal, hal ini dapat kita lihat pada persyaratan telah di tetapkan Pengurus bersama perangkat Desa pada saat Musyawarah Desa. Berikut persyaratan peminjaman secara pada UED-SP Taskin Angkasa :

1. Persyaratan Administrasi (foto copy KTP, KK dan pas foto);
2. Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K);
3. Surat Permohonan Kredit (SPK);
4. Membuat usulan Rencana usaha pemanfaat (RUP);
5. Surat pernyataan kuasa penjualan Agunan.⁷

Dalam keberadaannya UED-SP Taskin Angkasa diharapkan dapat membantu masyarakat setempat dalam membantu modal usaha masyarakat yang sedang dijalankan, seperti usaha dibidang pertanian, peternakan, maupun Jasa. Tentunya hadirnya UED-SP memberi dampak yang baik dalam meningkatkan usaha dan ekonomi Masyarakat Desa Angkasa. Namun pada bidang usaha tertentu, tidak semua masyarakat yang memperoleh keuntungan atas usahanya.

⁶ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁷ Wawancara dengan Pak Indra, S.IP, Tata Usaha Usaha Ekonomi Desa-Taskin Desa Angkasa, bertempat di Kantor UED-Taskin Angkasa pada tanggal 29 April 2016, Bertempat di Desa Angkasa.

Sering juga terjadi pasang surut pada usaha mereka, seperti yang di alami Syahril yang mendapatkan pinjaman dari UED-SP Taskin Angkasa dengan Surat tanah sebagai jaminan, pinjaman tersebut berjumlah Rp. 13.000.000,- yang digunakan untuk penambahan modal perkebunan karet milik Syahril, pada perjalanan usaha yang dilakukan ternyata terjadi penurunan harga jual hasil tani. Hal tersebut juga mengganggu pembayaran kredit Syahril. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa Nasabah Lainnya. Berikut tabel jumlah debitur, debitur yang menunggak dan debitur yang telah melunasi pinjaman pada UED-SP Taskin Angkasa.

Tabel 1.2 Jumlah Debitur, Debitur yang menunggak dan Debitur Lunas

N o	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Persentase
1	Debitur	85 Orang	100%
2	Debitur yang Menunggak	25 orang	21%
3	Debitur Lunas	9 orang	7,6%
	Jumlah	130	16%

Sumber data: Data Primer Olahan Tahun 2016

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁸ Untuk dapat dikatakan seseorang atau Peminjam melakukan wanprestasi harus dinyatakan dahulu bahwa peminjam tersebut lalai. Pernyataan tersebut dalam istilah Ilmu Hukum disebut dengan istilah Somasi atau pernyataan dari UED-SP Taskin Angkasa kepada peminjam. Pernyataan memuat bahwa UED-SP Taskin Angkasa menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata lain hutang harus ditagih terlebih dahulu. Hal ini sering terjadi dalam berlangsungnya kegiatan pinjam-meminjam pada UED-SP Taskin Angkasa.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 578.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang ada pada UED-SP TASKIN Angkasa tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pada Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi pada UED-SP Taskin Angkasa ?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada UED-SP Taskin Angkasa?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi pada UED-SP Taskin Angkasa.
2. Untuk Mengetahui penyelesaian permasalahan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada UED-SP Taskin Angkasa.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan teoritis

- 1) Sebagai Salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya. dengan permasalahan yang sama agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Untuk meningkatkan Ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai pelaksanaan UED-SP khususnya terhadap masyarakat yang melakukan wanprestasi.

b) Manfaat praktis

- 1) Dapat menjadi solusi dalam hal penegakan hukum terhadap permasalahan yang timbul terhadap

keberlangsungan

pelaksanaan UED-SP khususnya di Provinsi Riau.

- 2) Dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan bagi pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada UED-SP TASKIN bertempat di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki debitur-debitur yang wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian pemberian kredit..

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a) **Data Primer** adalah data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.⁹ Dalam hal ini penulis mengambil data dengan teknik, yaitu: Wawancara, kuisioner dan angket.
- b) **Data sekunder** adalah bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder inilah yang nantinya akan menjadi pembanding dari data hukum primer.
- c) **Data tersier** merupakan data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.¹⁰

⁹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Unri Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 16.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Riau. *Loc. Cit.*

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Kuisisioner**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi/hubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, yang pada umumnya dalam pertanyaan tersebut telah disediakan pilihan-pilihan jawabannya..
- b. **Wawancara**, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹¹
- c. **Kajian kepustakaan**, merupakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, literatur-literatur, Undang-Undang dan kamus hukum dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelola UED-SP TASKIN Desa Angkasa.
2. Masyarakat yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit.

b) Sampel

1. Pengelola UED-SP TASKIN Desa Angkasa (4 orang)
2. Dua puluh lima orang masyarakat yang melakukan penunggakan dalam pembayaran kredit.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.II Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Pengelola UED-SP Taskin Angkasa	4	4	100 %
2	Debitur yang melakukan wanprestasi	25	25	100 %
	Jumlah	29	29	-

Sumber Data: Data Primer Olahan Tahun 2016

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensual (*pactade contrahendo obligatoir*) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya.

Pada saat penyerahan uang dilakukan, maka baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Perjanjian kredit sebagai

¹¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 2010, hlm. 95.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 172.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 45.

perjanjian pendahuluan adalah perjanjian standard (*standard contract*). Hal ini terlihat dalam praktek bahwa setiap lembaga keuangan khususnya perbankan dan unit usaha simpan pinjam telah menyediakan blanko perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan lebih dahulu. Formulir ini diberikan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak dirundingkan dengan pemohon, kepada pemohon hanya diminta pendapat untuk menerima atau tidak syarat-syarat dalam formulir.

2. Jenis Perjanjian Kredit

Menurut H. Budi Untung, secara yuridis terdapat dua jenis perjanjian atau pengikatan dalam memberikan kredit, yaitu :

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit kepada nasabah yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;
- b. Perjanjian kredit notariil (otentik), yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

3. Jenis Perjanjian Kredit

Menurut H. Budi Untung, secara yuridis terdapat dua jenis perjanjian atau pengikatan dalam memberikan kredit, yaitu :

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit kepada nasabah yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya

karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;

- b. Perjanjian kredit notariil (otentik), yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

4. Prinsip-prinsip pemberian Kredit

Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas :

- a. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- b. *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- c. *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- e. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.¹⁴

5. Syarat dan Isi Perjanjian Kredit

Untuk membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 95.

pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 KUHPer, ada 4 (empat) syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

6. Unsur-unsur Kredit

Menurut Drs. Thomas Suyatno, unsur-unsur kredit terdiri atas¹⁵ :

- a. Kepercayaan
- b. Tenggang Waktu
- c. *Degree of risk*
- d. Prestasi

7. Jaminan/Agunan dalam Perjanjian Kredit

Menurut sifatnya, jaminan dibedakan ke dalam :

a. Jaminan Umum

Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur. sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan segala kebendaan debitur, baik yang bergerak dan yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

c. Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau “penyerahan” barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.

8. Konsep tentang Kredit Macet

Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang

nasabah dan debitur tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Apabila dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit;
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya, akan tetapi yang digolongkan sebagai kredit macet dalam hal ini adalah jika debitur kurang membayar satu kali angsuran;
3. Debitur membayar lunas kredit setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Wanprestasi

Sebelum mengkaji tentang wanprestasi, terlebih dahulu perlu diketahui tentang prestasi itu sendiri. Prestasi adalah obyek dari perikatan. Prestasi ditinjau dari sisi kreditur adalah hak yang dapat dituntut dari pihak debitur sedangkan prestasi ditinjau dari sisi debitur adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jadi, prestasi adalah obyek berikatan yang merupakan hak bagi pihak kreditur dan kewajiban bagi pihak debitur.

Wanprestasinya seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit;
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya, akan tetapi yang digolongkan sebagai kredit macet dalam hal ini adalah jika debitur kurang membayar satu kali angsuran;
3. Debitur membayar lunas kredit setelah jangka waktu perjanjian

¹⁵ Drs. Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hlm. 14.

berakhir.¹⁶

2. Jenis-jenis Wanprestasi

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 angka (1) yakni:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

Sementara menurut ahli lain, Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.¹⁸ Menurut Direktorat Pembiayaan, Deptan (2004)

dinyatakan bahwa “Lembaga Keuangan Mikro dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut”¹⁹. Menurut Krishnamurti (2005), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. Kedua, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

2. Asas dan Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Asas-asas Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 2 yaitu :

- a. Keadilan;
- b. Kebersamaan;
- c. Kemandirian;
- d. Kemudahan;
- e. Keterbukaan;
- f. Pemerataan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

¹⁶ Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 52.

¹⁶ A.Qiroim Syamsudin Meliala, *Pokok -Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 26.

¹⁷ R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

¹⁸ Sutanto Hadinoto dan Joko Retnadi, *Kunci Sukses Kredit Mikro*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 72.

¹⁹ Ashari, *Op.Cit*, hlm. 148.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Desa

Angkasa

1. Geografis

Desa Angkasa merupakan salah satu desa di kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan, letaknya sangat strategis karena merupakan desa terluar di kecamatan Bandar petalangan sehingga berbatasan langsung dengan kecamatan Pangkalan kuras kelurahan sorek satu yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar dikabupaten Pelalawan.

2. Jumlah Penduduk

Desa Angkasa terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW) serta 3 dusun, Penduduk Desa Angkasa berjumlah lebih kurang 2318 jiwa, yang didalam terdapat 596 KK, Berdasarkan tingkat klasifikasi Desa Angkasa tergolong pada desa Swakarya.

B. Profil Umum Tentang UED-SP Taskin Angkasa

1. Latar Belakang didirikan UED-SP Taskin Angkasa

UED-SP Taskin Angkasa merupakan milik masyarakat Desa Angkasa yang didirikan pada tanggal 05 Mei 2012, Adapun dasar pembentukan berdasarkan keputusan Kepala Desa Nomor : 141/Pemdes/kpts/VI2011/001. Yang pada saat tersebut Otoritas, Pengawas, Pendamping Desa dan KPM adalah :

Kepala Desa : Syafrizal
Ketua LKMD : Jamuir, S.Pd
Tokoh Perempuan : Nurbaiti
Ketua BPD : Syamsi.MS
Pendamping Desa : Tengku Afrianto, SE
KPM : Khosni Mubarak

Dan susunan Pengelola UED-SP Taskin Angkasa sebagai berikut :

Ketua : Karmadi, SE
Tata Usaha : Supardi
Kasir : Leni Sumartini
Staf Analis Kredit : Indra

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Debitur Melakukan Wanprestasi pada UED-SP Taskin Angkasa

Ada berbagai hal yang menjadi pemicu atau menyebabkan terjadinya kredit macet. Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola UED-SP Taskin Angkasa, Peneliti berpendapat bahwa berbagai hal tersebut digolongkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:²⁰

1. Faktor yang berasal dari UED-SP(Pengelola dan Otoritas)

a. Pengelola kurang cermat dalam melakukan analisa permohonan kredit debitur.

Rendahnya kemampuan atau ketajaman pengelola melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur secara profesional disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman pengelola dalam menjalankan tugasnya. Analisa yang tumpul tersebut dapat berupa terjadinya kesalahan dalam kemampuan pembayaran kembali (*repayment capacity*) dari debitur atas kredit yang diterimanya, bisa juga pengelola kurang memperhatikan informasi negatif mengenai calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga sebelum dilakukannya pencairan kredit.

b. Pemberian *plafond* kredit yang berlebihan (*over financing*) atas kebutuhan debitur.

Hampir sebagian besar calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit selalu menulis nominal yang lebih besar dari kebutuhan yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena tidak semua calon debitur memiliki perencanaan serta

²⁰ Wawancara dengan Pak Indra, S.IP Staf analisis Usaha Ekonomi Desa-TASKIN Desa Angkasa, bertempat di Kantor UED-TASKIN Angkasa pada tanggal 16 Desember 2016.

perhitungan yang baik atas kebutuhannya. Di sinilah pengelola dituntut untuk mampu melihat dengan jelas hal tersebut. Apabila kredit yang diberikan berlebihan maka akan terdapat dana idle yang dapat digunakan debitur untuk hal-hal yang tidak perlu, sebaliknya apabila kredit yang diberikan kurang dari yang dibutuhkan maka akan menghambat pergerakan debitur dalam usahanya.

c. Kurangnya pengawasan atas kredit yang diberikan.

Adanya salah persepsi dalam pemberian kredit bahwa kesuksesan dalam ekspansi kredit diukur dari jumlah besarnya nominal kredit yang diberikan dalam suatu periode tertentu, namun sebenarnya kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai prosedur yang berlaku, dengan pembayaran angsuran yang baik, dan dapat dilunasinya kredit oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk mendukung hal-hal tersebut diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh pengelola dari setiap kredit yang telah diberikan.

2. Faktor yang berasal dari internal debitur.

a. Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

a. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit.

Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah tidak menggemberikan, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran peluasan kreditnya.

b. Nasabah beritikad tidak baik.

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit. Namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai UED-SP dan tidak memiliki tanggung jawab serta menganggap enteng pembayaran kredit/pinjaman.

3. Faktor eksternal di luar kemampuan UED-SP dan debitur.

Ada berbagai macam faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi usaha dan keuangan debitur sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Faktor eksternal tersebut antara lain:

a. Bencana alam

Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya dapat mengganggu produktivitas usaha debitur. Apabila usaha debitur mengalami penurunan maka penghasilan yang diterima debitur pun akan mengalami penurunan, yang berakibat pada memburuknya keuangan debitur.

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Seringkali tidak kita sadari bahwa bekerja di perusahaan masih terdapat kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan, tidak berprestasi, atau perusahaan tidak membutuhkan mereka lagi, Hal ini lah yang menjadi resiko bagi debitur perorangan yang bekerja sebagai karyawan, di mana satu-satunya sumber penghasilan mereka adalah gaji yang mereka terima setiap bulannya, hal ini juga di dapatkan pada UED-SP Angkasa.

c. Menurunnya harga jual hasil pertanian.

Mayoritas debitur yang mendapatkan pinjaman yang diberikan UED-SP digunakan untuk meningkatkan produktivitas hasil tani. Turunnya harga jual hasil pertanian dipasaran membuat penghasilan mereka berkurang. Hal ini juga berdampak pada pembayaran angsuran kredit yang di pinjam pada UED-SP Taskin Angkasa.

2. Penyelesaian Permasalahan Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada UED-SP Taskin Angkasa.

Berikut penulis sajikan uraian upaya penyelesaian kredit yang dilakukan pengelola UED-SP Taskin Angkasa terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk bekerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali:

1) Penurunan Bunga Kredit.

Tindakan ini merupakan salah satu langkah penataan kembali yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur, sehingga dengan penurunan bunga kredit maka besarnya bunga yang harus dibayar menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya. Hal ini dikemukakan

Karmadi Indrawan (Ketua UED-SP Taskin Angkasa) yang mengatakan bahwa dengan adanya keringanan bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil, penurunan bunga kredit menjadi pilihan tersendiri agar debitur mau membayar angsuran kredit atas pinjaman yang diberikan.²¹

2) Perpanjangan Jangka waktu kredit.

Langkah pemberian perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan oleh Pengelola UED-SP Taskin Angkasa adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit debitur. Langkah ini dimaksudkan agar kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah dan dengan memperpanjang waktu memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya. Kebijakan atau langkah yang diambil ini Karmadi Indrawan (Ketua UED-SP Taskin Angkasa), selama ini lebih efektif dalam pemecahan masalah kredit macet, karena biasanya dengan adanya perpanjangan waktu pembayaran kredit di Debitur merasa tertolong dengan pembayaran yang sudah jatuh tempo harus dibayar dapat dipergunakan untuk memperkuat usahanya.

3) Penjualan sebagian atau seluruh anggunan/jaminan oleh debitur.

Kebijakan ini sering dilakukan oleh pengelola UED-SP Taskin Angkasa karena hal ini memudahkan untuk pengembalian hutang-hutang debitur. Disamping itu cara ini dapat lebih menghemat waktu, biaya dan hasilnya tidak menimbulkan permasalahan antara pengelola selaku kreditur dan debitur.

²¹ Wawancara dengan *Karmadi* Ketua UED-SP Taskin Desa Angkasa, bertempat di Kantor UED-SP di Desa Angkasa pada tanggal 17 Desember 2016.

Hal ini dikatakan oleh Indra (Analisis Kredit), cara seperti ini sangat efektif dan efisien karena tidak lagi memerlukan prosedur yang panjang dan hasilnya tidak menimbulkan permasalahan yang menjadi alasan Kepala desa dan Pengelola untuk tidak melelang agunan yang dijaminkan. Pengelola juga berperan dalam penjualan agunan yang dilakukan oleh debitur, sehingga hasil penjualan tersebut langsung disetor ke UED-SP Taskin Angkasa untuk pembayaran hutang debitur. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka penjualan diluar lelang / dibawah tangan dapat dilakukan.

Menurut Ujang (nasabah / debitur) dalam pelaksanaan kebijakan ini meringankan debitur diawasi oleh pengelola, dan jual beli harus diketahui oleh pengelola.²² Disisi yang lain sisa hasil penjualan dibawah tangan ini lebih banyak diperoleh oleh debitur setelah dipotong tunggakan kredit, tidak adanya biaya administrasi dan dapat dimanfaatkan langsung oleh debitur untuk membuka usaha yang lain

- 4) Penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh UED-SP Taskin Angkasa.

Kebijakan ini Merupakan langkah yang diberikan debitur kepada pengelola apabila debitur kesulitan atau tidak mampu menjual sendiri barang jaminan / anggunan untuk melunasi hutang-hutangnya. Akan tetapi menurut Indra (Analisis Kredit)), Hal ini tidak pernah terjadi, debitur lebih memilih mencari pembelinya sendiri karena harga jual bisa disepakati antara debitur sebagai penjual dan pembeli. Pengelola hanya menawarkan kepada debitur sebelum penjualan diserahkan kepada debitur.

Seperti yang dikatakan oleh Syahril(Nasabah / Debitur), cara ini membuat debitur lebih praktis karena debitur tidak lagi dibebani kewajiban yang tidak mudah itu, tetapi disisi lain nasabah / debitur merasa tidak puas apabila hasil penjualan itu terlalu kecil dan tidak dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya sehingga masih adanya kewajiban lagi yang dibebankan kepada debitur. Hal yang demikian ini bukan tidak mungkin terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pengelola dengan bekerjasama dengan pihak lain, atau bahkan membeli sendiri jaminan / anggunan tersebut dengan harga yang murah.²³

Dari penyelesaian-penyelesaian di atas terlihat bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada UED-SP Taskin Angkasa tidak melalui proses penyitaan/pelelangan tetapi lebih diselesaikan dengan musyawarah Desa atau secara kekeluargaan yang di anggap tidak menimbulkan masalah oleh Pengelola maupun Pemegang Otoritas. Dan dapat dilihat penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh UED-SP Taskin Angkasa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan peraturan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian hasil penelitian pada bab-bab yang sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada UED-SP Taskin Angkasa yang penulis dapatkan terdiri dari berikut : Faktor yang berasal dari UED-SP (Pengelola dan Otoritas), *Pertama*, Pengelola kurang cermat dalam melakukan analisis permohonan kredit debitur. *Kedua*, Pemberian kredit yang berlebihan

²² Wawancara dengan Ujang Debitur UED-SP Taskin Desa Angkasa, bertempat di Kediannya di Desa Angkasa pada tanggal 17 Desember 2016.

²³ Wawancara dengan Syahril Debitur UED-SP Taskin Desa Angkasa, bertempat di Kediannya di Desa Angkasa pada tanggal 17 Desember 2016.

(*over financing*) atas kebutuhan debitur. *Ketiga*, Kurangnya pengawasan atas kredit yang diberikan. Selanjutnya Faktor yang berasal dari internal debitur : *Pertama*, Nasabah menyalah gunakan kredit. *Kedua*, Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. *Ketiga*, Nasabah beritikad tidak baik. Dan Faktor eksternal di luar kemampuan UED-SP dan debitur : *Pertama*, Bencana alam. *Kedua*, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Ketiga*, Menurunnya harga jual hasil pertanian.

2. Penyelesaian permasalahan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada UED-SP Taskin Angkasa tidak pernah dilakukan penyitaan dan penjualan atas agunan debitur. Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat musyawarah Desa. Berikut penyelesaian permasalahan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi : *Pertama*, Penurunan Bunga Kredit. *Kedua*, Perpanjangan Jangka waktu kredit. *Ketiga*, Penjualan sebagian atau seluruh jaminan oleh debitur. *Keempat*, Penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh UED-SP Taskin Angkasa. UED-SP Taskin Angkasa tidak melakukan pelelangan terhadap debitur yang melakukan penunggakan yang telah diberi somasi sebanyak 2 kali, Kebijakan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Desa karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

B. Saran

1. Dalam pemberian kredit pengelola diharapkan lebih meningkatkan analisis pemberian kredit untuk menekan jumlah penyalahgunaan kredit oleh debitur serta Pengelola diharapkan mengurangi resiko kredit macet dengan cara tidak memberikan kredit secara berlebihan guna memperkecil peluang pinjaman untuk disalahgunakan dan menghindari dari debitur yang tidak beritikad baik.
2. Pengelola diharapkan memberikan tindakan tegas untuk menyelamatkan keuangan UED-SP Taskin Angkasa terhadap permasalahan kredit guna menyelamatkan kredit agar tidak

mengganggu kesehatan keuangan UED-SP Taskin Angkasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Qiroim Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok -Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Ashari, 2006, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya Pusat Analisis Sosial Dan Kebijakan Pertanian*, Bogor.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Badruzaman Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Bahsan, M, 2007, *Hukum jaminan dan jaminan kredit di Indonesia*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Budisantoso, Totok dan Triandaru Sigit, 2006, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Unri Press, Pekanbaru.
- Hadinoto, Sutanto dan Joko Retnadi, 2005, *Kredit Mikro, Kunci Sukses Kredit Mikro*, PT Gramedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Kasmir. 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Komariah, 2002, *Hukum perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Kadir Abdul, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah, Cetakan I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1970, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- _____, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio J, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Setiawan R, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti,R, 1970, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- _____, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyatno, Thomas 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan, Cetakan ke-11*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Projodikoro R. Wiryono, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Untung H. Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset, Yogyakarta.

Usman Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Thesis

Retno Widayat, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Unit Usaha Simpan Pinjam SWAMITRA KUD Banyudono Selatan)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2014.

Novi Tania, "Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di PD.BPR BKKMargadana Kota Tegal", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Pekanbaru 2010.

Sri Hartini, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Pusat PT Bukopin Tbk", *Thesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (SKB LKM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam.

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 tentang tentang Uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Privisi Riau.

Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 tanggal 5 April 2005 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Dana Usaha Desa (DUD) Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan- Simpan Pinjam (UED/K-SP)

D. Website

<http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses, tanggal 19 Mei 2016.

<http://jurnal.ilmuhukum.blospot.com>, diakses, tanggal 19 Mei 2016.

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23039/3/Chapter %20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23039/3/Chapter%20II.pdf), diakses, tanggal 19 Mei 2016.

[http://www.legalakses.com/perjanjian /](http://www.legalakses.com/perjanjian/), diakses, tanggal 19 Mei 2016.

www.sjdih.depkeu.go.id. diakses, tanggal 19 Mei 2016.